



UPT Malioboro di Bawah Disperindagkoptan

JOGJA -- Unit pelaksana teknis (UPT) Malioboro yang memiliki enam satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) akan berada di bawah koordinasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta.

“Koordinasi di bawah Disperindagkoptan ini diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi di Malioboro,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Jumat.

Menurut Haryadi, lima SKPD di UPT Malioboro adalah Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Ketertiban serta Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. SKPD tersebut sedang dalam proses pembentukan.

“Diharapkan pada Juni nanti sudah mulai bergerak dan tidak ada lagi kesimpangsiuran tugas serta tanggung jawab,” katanya. Pembentukan UPT Malioboro bertujuan untuk menciptakan suasana Malioboro yang lebih rapi, bersih dan tertib. Jumlah pedagang yang terus bertambah dengan luas lahan yang sama dari tahun ke tahun membuat kondisi kawasan Malioboro semakin tidak tertata.

Haryadi mengatakan, pemerintah kota belum akan melaksanakan pembangunan fisik di kawasan Malioboro, tetapi lebih

menekankan pada komitmen seluruh komunitas di Malioboro untuk memelihara kawasan yang menjadi pusat tujuan wisata tersebut.

“Yang terpenting adalah menumbuhkan komitmen, bukan untuk menyuarakan suara dari sebuah komunitas saja, tetapi suara dari Malioboro,” katanya.

Menurut Haryadi, meski tidak ada data statistik yang mendukung, kondisi Malioboro saat ini dirasa sudah kurang nyaman untuk pengembangan pariwisata, baik bagi wisatawan maupun masyarakat seperti pedagang kaki lima atau pemilik toko yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk mendukung perekonomian keluarga.

Kondisi lingkungan yang kotor, tidak aman dan ketidaknyamanan menjadi keluhan rutin yang kerap dilontarkan wisatawan, seperti harus membayar makan yang terlalu mahal, kebersihan yang tidak terjaga atau sering terjadi aksi pencopetan di kawasan itu.

Kawasan Malioboro, memiliki daya tarik dan ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga revitalisasi adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi untuk mengembalikan Malioboro menjadi kawasan yang nyaman bagi wisatawan.

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
5. Dinas Ketertiban			
6. Badan Lingkungan Hidup			

